

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 15 Mei 2019, Pemerintahan Presiden Trump memberlakukan kebijakan restriktif kepada raksasa teknologi asal Tiongkok, Huawei, di Amerika Serikat. Tiezzi (2019) menyatakan bahwa sudah sejak lama pemerintah Amerika Serikat merasa terancam dengan keberadaan Huawei di Amerika Serikat, terutama pasca datangnya inovasi infrastruktur internet 5G milik Huawei, sehingga pada pemerintahan Presiden Trump, Amerika Serikat memutuskan untuk melarang operasi Huawei di seluruh negara akibat ancaman-ancaman yang dapat diberikan oleh teknologi 5G. Bowler (2020) menyatakan bahwa salah satu ancaman yang dikhawatirkan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap teknologi 5G Huawei adalah adanya spionase terhadap negara, perusahaan, hingga individu masyarakat Amerika Serikat yang dilakukan oleh Huawei untuk Tiongkok. Amerika Serikat melarang operasi Huawei dengan memasukkan nama perusahaan tersebut kedalam *Entity List* dari Bureau of Industry and Security (BIS) milik Departemen Perdagangan Amerika Serikat. BIS memasukkan Huawei kedalam *Entity List* karena perusahaan yang bersangkutan dinilai telah melakukan operasi yang bertentangan dengan kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat (Bureau of Industry and Security, 2019).

Hal ini dinilai mengejutkan, pasalnya Huawei sebelumnya merupakan salah satu mitra penting bagi Amerika Serikat dalam hal riset dan pengembangan keamanan siber. Investasi Huawei dalam industri riset dan pengembangan merupakan salah satu investasi yang bermanfaat bagi masyarakat Amerika Serikat. Steinbock (2012: 35) menyatakan bahwa investasi Huawei memberikan kurang lebih sepuluh ribu pekerjaan berkualitas tinggi bagi masyarakat pekerja Amerika Serikat dalam industri riset dan pengembangan. Selain itu, Huawei juga telah menjadi mitra keamanan siber bagi pemerintah Amerika Serikat yang signifikan, akibat keefektifan sistem keamanan siber yang ditawarkan serta harganya yang cenderung terjangkau. Sejak tahun 2011, Huawei telah menjalin hubungan yang

cukup mendalam dengan pemerintah, industri, dan pelanggan Amerika Serikat lainnya akibat superioritasnya dalam menjamin keamanan siber melalui jaminan keamanan siber Huawei (Steinbock, 2012: 51). Keamanan siber menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk menjalin kooperasi dengan firma-firma keamanan siber, karena jumlah serangan siber kepada infrastruktur vital Amerika Serikat terus meningkat sejak tahun 2009 hingga tahun 2011, yang mana seiring meningkatnya serangan-serangan siber yang ada maka diperlukan pula asuransi keamanan siber, sehingga Huawei menjadi salah satu mitra penting bagi pemerintah Amerika Serikat dalam keamanan siber.

Puncak dari rentetan kecurigaan Amerika Serikat terhadap Huawei terjadi pada Januari tahun 2019, yang mana pemerintahan Presiden Trump secara formal memasukkan Huawei kedalam *entity list* dari BIS. *Entity list* menyebabkan perusahaan serta klien lainnya yang hendak menggunakan produk Huawei harus memohon penerbitan lisensi kepada pemerintah Amerika Serikat, yang mana pemerintah Amerika Serikat akan cenderung menolak pemohon yang dirasa bisnisnya akan mengancam keamanan Amerika Serikat (Lecher & Brandom, 2019). Sehingga dapat dinyatakan bahwa pemerintah melarang penggunaan produk Huawei dalam level pemerintah hingga perusahaan lokal Amerika Serikat. Alasan pemerintah Amerika Serikat untuk mengambil langkah tersebut adalah adanya tuduhan terhadap Huawei yang telah melanggar International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dengan menjual teknologi serta menyediakan layanan keuangan terhadap Iran (Arthur, 2018). Selain itu, sama halnya dengan Australia, Amerika Serikat meyakini bahwa Huawei memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah Tiongkok, yang mana perusahaan swasta tersebut dikhawatirkan akan tunduk dengan arahan pemerintah ekstra-yudisial yang kemudian dapat meningkatkan risiko keamanan (Arthur 2018).

Menanggapi hal tersebut, pihak Huawei membantah pernyataan-pernyataan pemerintah Amerika Serikat yang dinilai hanya sebuah tuduhan tanpa adanya bukti yang kuat. Lecher & Brandom (2019) menyatakan bahwa pihak Huawei menyangkal tuduhan mengenai adanya ancaman keamanan yang ditimbulkan dari

kegiatan bisnis Huawei di Amerika Serikat. Pimpinan Huawei juga menyatakan bahwa keputusan pemerintah Amerika Serikat merupakan keputusan yang munafik, dengan mengkritik korporasi dan pemerintah Tiongkok sedangkan agen mata-mata Amerika Serikat tersebar luas di seluruh dunia (Lecher & Brandom 2019). Pihak Huawei juga bertindak lebih jauh, mereka menempuh jalur hukum dengan tuntutan bahwa pihak Amerika Serikat telah melakukan tindakan yang tidak konstitusional. Selain dari pihak Huawei, kepala Kantor Federal untuk Keamanan Informasi di Bonn, Jerman, pada tahun 2018 menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk dapat menuduh bahwa Huawei melakukan spionase (Magee, 2019). Mengenai tuduhan adanya keterkaitan tertentu antara Huawei dengan pemerintah Tiongkok, pemerintah Amerika Serikat juga belum dapat menunjukkan bukti yang kuat, dibuktikan dengan adanya kesulitan dalam upaya memahami pola hubungan antara Huawei dengan pemerintah Tiongkok (Rogers & Ruppertsberger, 2012: 2).

Fenomena tersebut dapat dinilai sebagai salah satu fenomena yang mengejutkan karena Huawei yang merupakan perusahaan swasta Tiongkok, dengan pengakuannya mengenai ketidakterkaitannya dengan pemerintah Tiongkok dalam segala bentuk bisnisnya harus menjalani hubungan yang begitu buruk dengan mitranya. Meski fenomena Perang Dagang yang saat ini sedang berlangsung sering kali dinilai sebagai salah satu faktor signifikan, namun perlu diketahui bahwa seluruh aktivitas bisnis Huawei tidak ada kaitannya dengan daftar barang dan jasa yang masuk dalam perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok (Magee, 2019).

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah mengapa pemerintah Amerika Serikat melarang operasi bisnis Huawei di wilayah tersebut meski investasi Huawei menguntungkan pasar tenaga kerja dan membantu keamanan siber di Amerika Serikat selama ini?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mencari tahu mengenai alasan-alasan restriksi operasi bisnis Huawei di Amerika Serikat. Amerika Serikat yang cenderung

membebaskan investasi dan operasi bisnis khususnya untuk perusahaan swasta karena sistem pasar bebas yang dianut kini memiliki kecenderungan untuk melakukan intervensi kepada perusahaan-perusahaan swasta yang berasal dari Tiongkok, khususnya Huawei. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan alasan apa saja yang memotivasi pemerintah Amerika Serikat untuk menerapkan kebijakan restriktif kepada Huawei.

1.4. Kerangka Berpikir

Kehadiran sebuah perusahaan multinasional dalam sebuah negara tidak akan terlepas dari intervensi pemerintah *host country*. Perusahaan multinasional sebagai investor akan sedikit banyak bergantung dengan regulasi-regulasi yang diformulasikan oleh pemerintah, sehingga sudah merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan multinasional untuk meneliti iklim politik domestik sebelum memasuki pasar suatu negara. Pada dasarnya, seluruh intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan multinasional didasari oleh kepentingan publik maupun kepentingan politik tertentu. Golub (2003: 86) menyatakan bahwa terdapat dua alasan bagi pemerintah untuk membatasi suatu investasi asing yang masuk ke sebuah negara, yakni alasan ekonomi dan alasan politik. Alasan ekonomi dapat ditinjau melalui adanya arus investasi Jepang yang masuk ke Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang mana pemerintah Amerika Serikat akhirnya membatasi investasi yang masuk dari Jepang dengan berbagai alasan, yang dijelaskan oleh Golub (2003:86) bahwa dampak ekonomi yang diduga termasuk defisit neraca pembayaran, berkurangnya riset dan pengembangan dalam negeri, berkurangnya kompetisi, *crowding-out* perusahaan domestik dan rendahnya lapangan kerja.

1.4.1. Alasan Keamanan Nasional

Kemudian terdapat alasan politik bagi pemerintah untuk membatasi investasi suatu perusahaan multinasional di sebuah negara, yang mana alasan politik berkaitan erat dengan keamanan nasional (Golub, 2003: 87). Wild et al. (2015: 186) menyatakan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk melarang investasi dari perusahaan asing yang hendak berinvestasi di sektor industri kultural dan sektor industri yang vital terhadap keamanan nasional. Intensnya investasi

asing dalam sebuah negara, terutama bagi perusahaan yang menguasai industri strategis seperti aviasi, elektronik, dan telekomunikasi akan cenderung membahayakan keamanan nasional dalam waktu krisis atau peperangan. Meski peristiwa tersebut merupakan suatu pertimbangan yang diabaikan karena mayoritas investasi asing berasal dari negara sekutu, namun risiko keamanan nasional tetap hadir. Selain itu, tingginya investasi asing dapat menyebabkan peningkatan tekanan politik dari kelompok-kelompok kepentingan asing melalui para pelobi, yang mana tekanan politik tersebut akan cenderung mengarah kepada kepentingan perusahaan asing yang beroperasi di negara yang bersangkutan (Golub, 2003: 87-88). Golub (2003: 88) melanjutkan bahwa dampak politik yang dapat dihasilkan dari tingginya kendali investor asing di sebuah negara terutama dalam sektor industri *high-profile* seperti aviasi dan teknologi telekomunikasi akan mengganggu kepekaan nasional. Pertimbangan dasar mengenai keamanan nasional dalam hal tersebut adalah untuk mencegah jatuhnya kendali industri strategis ke tangan asing. Sehingga untuk menangani risiko non-ekonomi tersebut pemerintah harus mengendalikan laju investasi asing, baik dengan membatasi, memutus, ataupun melarang sebuah investasi asing dalam sektor tertentu yang dianggap vital bagi sebuah negara.

Sektor teknologi, atau lebih spesifik lagi sektor teknologi telekomunikasi merupakan sektor vital yang cenderung berkaitan erat dengan keamanan sebuah negara, karena seluruh sektor ekonomi lain bergantung dengan infrastruktur telekomunikasi untuk dapat menjalankan bisnisnya. Donahue (2019: 20) menyatakan bahwa bisnis perlengkapan dan peralatan telekomunikasi yang terintegrasi bukan hanya merupakan permasalahan “konsumen”, melainkan tentang sistem yang digunakan oleh infrastruktur kritis. Jatuhnya sektor industri yang dianggap vital akan cenderung menguntungkan pihak asing, terutama pada waktu-waktu tertentu yang tidak diharapkan seperti masa krisis dan perang, karena pihak asing akan dengan mudah mengganggu jaringan komunikasi suatu negara. teknologi-teknologi seperti 3G (*Third Generation*), 4G (*Fourth Generation*), dan 5G (*Fifth Generation*) merupakan sektor yang vital bagi setiap negara, karena berkaitan dengan laju komunikasi dan informasi sebuah negara, yang mana dari sipil hingga militer bergantung kepada teknologi tersebut. Perusahaan akan

berusaha mendominasi pasar sebuah negara dengan berinvestasi di perangkat keras, perangkat lunak, dan standar-standar teknis.

Kaska et al. (2019: 10) menyatakan bahwa meski banyak pemerintah negara telah melarang perusahaan asing untuk berinvestasi di sektor telekomunikasi, namun tidak sedikit perusahaan lokal yang menjadi pemain sektor telekomunikasi bergantung kepada suplai perlengkapan teknologi telekomunikasi dari perusahaan asing. Sehingga perusahaan asing yang dinilai telah memberikan dampak ancaman terhadap keamanan nasional akan menjadi perhatian sebuah pemerintah negara untuk dilakukan sebuah intervensi. Ancaman keamanan yang dapat dihasilkan dari kehadiran sebuah perusahaan asing pada umumnya berupa jatuhnya sebuah aset strategis sebuah negara ke pihak asing (Dunning, 1993: 20). United Nations Conference on Trade and Development (2019) menyatakan bahwa negara memiliki wewenang untuk memutus investasi asing yang dinilai dapat mengancam keamanan suatu negara yang berdaulat. Melalui alasan tersebut, negara cenderung merespons kekhawatirannya terhadap suatu perusahaan yang dicurigai dapat mengancam keamanannya dengan membatasi operasi bisnis perusahaan yang bersangkutan (Dunning, 1993: 20).

Ancaman keamanan yang dapat dihasilkan dari perusahaan sektor teknologi cenderung berupa ancaman-ancaman yang bersifat siber. Kaska et al. (2019: 6) menyatakan bahwa adanya ketergantungan terhadap penggunaan jaringan telekomunikasi akan cenderung meningkatkan tujuan pihak lain untuk melakukan spionase. Intelligence and National Security Alliance (2019: 8) menyatakan bahwa spionase dapat dilakukan melalui akses kepada perlengkapan telekomunikasi dengan sistem keamanan yang tidak terjamin. Spionase dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling mencuri informasi-informasi krusial seperti informasi militer, teknologi industri, dan rahasia dagang (Rubenstein, 2014: 4). Spionase dengan mengumpulkan informasi-informasi tersebut memiliki manfaat untuk keuntungan ekonomi serta kesiapan suatu negara dalam ranah perang siber. Sehingga Rubenstein (2014: 5-6) menyatakan bahwa industri-industri yang terlibat dalam

spionase akan cenderung memiliki keterikatan dengan negara *home*-nya dalam rangka memenuhi kepentingan negara *home* yang bersangkutan.

Alasan keamanan nasional juga tidak terlepas dari adanya kecurigaan sebuah negara mengenai adanya keterlibatan pihak-pihak eksternal dalam sebuah perusahaan asing yang mengoperasikan bisnisnya di wilayah kedaulatannya. Blake & Walters (1976 dalam Steinbockova, 2007: 44) menyatakan bahwa keterlibatan negara asing dalam suatu perusahaan multinasional akan semakin meningkatkan eskalasi ancaman nasional sebuah negara. Pada umumnya, pihak asing seperti *home country* merupakan motivasi utama bagi perusahaan multinasional untuk melakukan aktivitas lain selain mencari keuntungan, yang mana dalam hal ini berusaha menguasai sektor vital negara (Steinbockova, 2007: 44). Keterlibatan negara asing dapat menjadi sponsor utama bagi sebuah perusahaan multinasional, sehingga alasan keamanan dan keterlibatan negara asing tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu keputusan investasi sebuah perusahaan multinasional di sebuah negara.

Di Amerika Serikat, pemerintah akan cenderung memberikan kebebasan kepada investor asing yang mampu memberikan resiprositas kepada investor Amerika Serikat, namun Presiden Amerika Serikat memiliki wewenang untuk menangguk atau melarang investor asing yang terbukti mengancam keamanan nasional Amerika Serikat dan kepentingannya (31 International Legal Materials, 1992: 1). Alasan keamanan nasional merupakan alasan yang memiliki validitas paling besar bagi pemerintah Amerika Serikat dalam upayanya untuk memutus investasi Huawei di wilayah Amerika Serikat, karena alasan tersebut dapat diberikan kepada publik. Presiden Trump menandatangani surat perintah eksekutif untuk memasukkan Huawei kedalam *entity list* dari BIS dengan sebuah alasan keamanan nasional. Kaska et al. (2019: 15) menyatakan bahwa Huawei telah mengancam keamanan nasional Amerika Serikat dengan melakukan spionase terhadap informasi-informasi mengenai teknologi industri serta teknologi militer Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mencurigai bahwa Huawei melakukan spionase melalui produk-produk perlengkapan teknologi

telekomunikasi miliknya untuk dapat mengendalikan arus data yang disalurkan oleh perangkat-perangkat yang bersangkutan.

1.4.2. Keterlibatan Pemerintah dalam Operasi Bisnis MNC

Kehadiran sebuah perusahaan multinasional, khususnya perusahaan multinasional yang berasal dari negara berkembang, tidak terlepas dari kepentingan pemerintah *home country*. Bazuchi et al. (2013: 418-419) menyatakan bahwa pemerintah negara berkembang memiliki kecenderungan untuk mencari manfaat dari investasi keluar, sehingga pemerintah akan mendukung perusahaan multinasional yang hendak berinvestasi keluar melalui kekuasaan dan sanksi non-ekonomi. Pemerintah negara dapat memberikan subsidi berupa sumber daya finansial, memberikan pengendalian yang efektif terhadap entitas perusahaan, seperti layaknya perusahaan milik negara, memfasilitasi akses pasar perusahaan multinasional, berdialog dengan pemerintah asing dan organisasi internasional, dan bahkan memberlakukan hambatan pada transfer faktor produksi dan kontrol kepemilikan (Bazuchi et al., 2013: 418). Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan multinasional negara berkembang dengan perusahaan multinasional yang berasal dari negara maju. Karakteristik dari perusahaan multinasional negara berkembang yang cenderung berasal dari lingkungan politik dan ekonomi yang tidak stabil memiliki prioritas kompetensi berupa keunggulan biaya (Rasiah et al., 2010 dalam Bazuchi et al., 2013: 419). Ekonomi negara berkembang memiliki kesulitan yang signifikan dalam menciptakan dorongan investasi keluar dari perusahaan lokal dan menjadikannya menguntungkan, sehingga pemerintah akan cenderung memberikan dukungan khususnya berupa bantuan finansial untuk mempermudah investasi keluar perusahaan.

Setiap negara berkembang memiliki preferensi pencarian manfaat dari investasi keluar yang berbeda-beda, namun seluruh pemerintah negara berkembang dengan tingkat pendapatan rendah hingga menengah memiliki kecenderungan untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju. Untuk mengatasi masalah pendapatan dan mengejar

ketertinggalan dengan negara maju, Lee dan Kim (2009 dalam Liu et al., 2017: 657) menemukan bahwa pengembangan teknologi dan kualitas pendidikan yang tinggi merupakan solusi yang efektif dalam menciptakan pertumbuhan untuk negara dengan pendapatan menengah. Negara dapat memprioritaskan pengembangan ataupun akuisisi teknologi agar dapat keluar dari ketergantungannya terhadap produksi barang-barang kelas bawah menuju produksi barang-barang dan jasa bernilai tambah tinggi agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Liu et al., 2017: 657). Perusahaan memainkan peran sentral dalam upaya pengembangan dan akuisisi teknologi dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan negara maju. Dalam kasus perusahaan multinasional yang berasal dari negara ekonomi berkembang, investasi yang dilakukan memiliki tiga motivasi utama, yakni; (1) mendapatkan akses terhadap pasar baru, (2) mencari efisiensi harga, (3) mencari sumber daya atau aset berharga, seperti teknologi (Dunning, 1993 dalam Buckley et al., 2007: 501). Dengan demikian, perusahaan dapat menjadi aktor yang signifikan dalam upaya pengembangan teknologi nasional, sehingga negara berkembang cenderung memberi dukungan terhadap internasionalisasi perusahaan dalam rangka pencarian aset teknologi.

Sebuah negara melarang operasi bisnis sebuah korporasi multinasional karena adanya dorongan politik yang umumnya disebabkan oleh adanya rivalitas tertentu antara *host Country* dengan *home Country*. Perusahaan swasta asing yang memiliki hubungan erat dengan negara asalnya akan sedikit banyak merugikan *host country* tempat suatu perusahaan multinasional beroperasi. Motivasi untuk melarang operasi bisnis suatu perusahaan multinasional akan kian meningkat seiring adanya konflik ataupun persaingan antara *host country* dan *home country* sebuah perusahaan multinasional (Blake & Walters, 1976 dalam Steinbockova, 2007: 54). Dalam kasus Huawei di Amerika Serikat, Seely et al. (2019: 3) menyatakan bahwa Huawei merupakan salah satu produk dari ekosistem nasional Tiongkok, yang mana perusahaan tersebut dibatasi, dipengaruhi, dan diarahkan oleh lingkungan hukum dan politik Tiongkok. Sebagai perusahaan teknologi yang sukses mendominasi pasar infrastruktur telekomunikasi global sebagai dampak dari bantuan pemerintah Tiongkok, hal tersebut meningkatkan tensi hubungan antara

Amerika Serikat dengan Tiongkok, yang berujung restriksi bisnis Huawei di Amerika Serikat sebagai upaya pemerintah Amerika Serikat untuk membendung dominasi Huawei.

Dominasi pasar dalam pangsa pasar global menjadi determinan yang krusial bagi suatu negara untuk melakukan kebijakan restriktif, terutama jika suatu perusahaan yang berasal dari negara pesaing telah mendominasi pasar global. Kaska et al. (2019: 21) menyatakan bahwa dominasi sebuah perusahaan dalam sektor telekomunikasi berkaitan erat dengan infrastruktur jaringan sebuah negara, sehingga melalui pasar infrastruktur global, pemerintah negara *home* dari perusahaan yang bersangkutan dapat memperluas spektrum kooperasi dalam sektor telekomunikasi dengan negara lain. National Intelligence Council (2007: 3) menyatakan bahwa perusahaan multinasional yang berasal dari Tiongkok dan *emerging markets* lainnya cenderung menawarkan produk mereka kepada negara-negara berkembang yang kemudian dapat menyebabkan melemahnya pengaruh pemerintah negara Barat di negara-negara yang bersangkutan akibat terhambatnya investasi alternatif yang dapat ditawarkan oleh Amerika Serikat maupun negara Barat lainnya.

Rivalitas teknologi yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi faktor yang signifikan bagi Amerika Serikat untuk memberlakukan kebijakan restriktif terhadap Huawei. Kennedy dan Lim (2018: 559) menyatakan bahwa negara yang berperan sebagai kekuatan dominan dalam pengembangan teknologi akan memiliki motivasi yang kuat untuk merespon negara yang sedang bangkit jika negara tersebut memberikan dampak negatif terhadap kepentingan strategis negara dominan. Tiongkok yang dinilai sebagai negara yang bangkit dalam pengembangan teknologi telah mengancam posisi kepemimpinan pengembangan teknologi Amerika Serikat. Investasi *high tech* pemerintah Tiongkok yang substansial memberikan tekanan terhadap posisi kepemimpinan teknologi Amerika Serikat di dunia (Kennedy & Lim, 2018: 562). Perbedaan politik antara Tiongkok dan Amerika Serikat, kompetisi teknologi, peran negara dalam inovasi, serta kerentanan teknologi Tiongkok telah mendorong Amerika Serikat

untuk merespons secara agresif, seperti dengan memberlakukan intervensi (Petri, 2019: 1).

1.5. Hipotesis

Berangkat dari latar belakang dan kerangka pemikiran di atas, penulis berargumen bahwa di balik restriksi operasi Huawei di Amerika Serikat, ada dua alasan yang mendasari kebijakan intervensi Amerika Serikat terhadap perusahaan Huawei. Pertama, Huawei dapat mengancam keamanan nasional Amerika Serikat akibat praktik spionase ekonomi terhadap informasi teknologi industri dan teknologi militer Amerika Serikat. Kedua, Huawei memiliki keterkaitan yang erat dengan negara *home* hingga bersifat mewakili kepentingan negara *home* akibat intervensi yang signifikan dari Tiongkok terhadap operasi bisnis Huawei. Intervensi signifikan ini membuat Huawei dapat mendominasi pasar infrastruktur telekomunikasi serta meningkatkan rivalitas teknologi yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

1.6. Metodologi dan Metode Penelitian

1.6.1 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1. Keamanan Nasional

Buzan (1983: 216-217) menyatakan bahwa keamanan merupakan segala hal yang mencakup pengejaran kebebasan dari segala bentuk ancaman. Sehingga dapat dinyatakan bahwa keamanan nasional harus mencakup politik, ekonomi, sosial, lingkungan, militer, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia dalam sebuah negara. Mengenai aspek keamanan nasional non-militer, Lewis (2006: 1) menyatakan bahwa keamanan siber merupakan salah satu dimensi keamanan nasional, karena keamanan siber menyangkut ketergantungan pada sistem komputer di sebagian besar masyarakat dan institusi negara. Mengenai keamanan nasional, pemerintah merupakan aktor utama untuk menjamin keamanan seluruh masyarakat yang hidup dalam suatu negara. Paleri (2008: 52-53) menyatakan bahwa kapabilitas keamanan nasional suatu negara dapat diukur dari kemampuan suatu bangsa untuk mengatasi ancaman dari berbagai dimensi

keamanan terhadap kesejahteraan rakyatnya, sehingga negara memiliki wewenang penuh atas mengimplementasikan suatu kebijakan dengan alasan keamanan nasional. Dalam penelitian ini, keamanan nasional dipahami sebagai kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah demi melindungi kepentingan nasional suatu negara. Secara lebih rinci, penelitian ini melihat bagaimana Huawei mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat, yang mana kepentingan tersebut menyangkut keamanan pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat.

1.6.1.2. Spionase Ekonomi

Encyclopedia Britannica (2020) mendefinisikan spionase informasi sebagai seluruh proses dalam rangka mendapatkan informasi rahasia mengenai militer, politik, komersial, industri, dan sektor-sektor lainnya melalui mata-mata, agen rahasia, atau perangkat pemantauan ilegal. Dalam dimensi ekonomi, Liberto (2019) menyatakan bahwa spionase ekonomi dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan pencurian intelijen ekonomi kritis seperti rahasia dagang dan kekayaan intelektual. Dengan dilakukannya spionase ekonomi, korban dapat menderita kerugian ekonomi yang curam karena mudahnya akses terhadap informasi-informasi hak milik yang tak ternilai di sejumlah bidang, termasuk teknologi, keuangan, dan kebijakan pemerintah. Liberto (2019) melanjutkan bahwa kegiatan spionase informasi terhadap ekonomi suatu negara umumnya disponsori oleh negara lain, dengan motif berupa mencari keuntungan demi mengurangi jeda perkembangan teknologi antara negara pelaku dengan negara yang dituju. Selaras dengan hal tersebut, Lotrionte (2014: 899) menyatakan bahwa mayoritas spionase ekonomi yang disponsori oleh negara dilakukan melalui jalur siber dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di era globalisasi.

Lebih spesifik, Lotrionte (2019: 899) menjelaskan mengenai kerugian ekonomi yang diderita Amerika Serikat terhadap maraknya aktivitas spionase ekonomi yang terjadi di negara tersebut, yang mana spionase ekonomi telah mengikis keunggulan ekonomi kompetitif Amerika Serikat di pasar internasional. Kerugian yang dialami memberikan ancaman terhadap keamanan dan kepentingan nasional Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, spionase ekonomi dipahami

sebagai tindakan spioanase yang dilakukan Tiongkok terhadap Amerika Serikat melalui perusahaan Huawei, yang mana pihak Amerika Serikat telah mengaku mengalami kerugian ekonomi yang signifikan akibat pencurian informasi kritis yang dilakukan oleh Huawei demi kepentingan Tiongkok. Dengan demikian, keamanan nasional Amerika Serikat terancam akibat eksistensi dari perusahaan Huawei di negara tersebut.

1.6.1.3. Kepentingan Negara Home

Gilpin (2001: 297-298) menyatakan bahwa kehadiran perusahaan multinasional tidak terlepas dari adanya kepentingan negara *home*, karena struktur domestik dan ideologi ekonomi negara *home* terus memiliki pengaruh yang kuat terhadap strategi dan kegiatan perusahaan multinasional. Vahter & Masso (2005: 2) menyatakan bahwa investasi ke luar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi negara *home*, karena investasi tersebut dapat memberikan transfer pengetahuan, teknologi, pemasaran, informasi terkait pasar asing, dan informasi lainnya yang memudahkan perusahaan lokal negara *home* untuk dapat menjadi perusahaan multinasional. Selaras dengan pernyataan-pernyataan tersebut, Sauvart & Nolan (2015: 895) menyatakan bahwa negara akan cenderung mendukung sebuah perusahaan untuk melaju ke ranah multinasional, karena negara ingin mendapatkan manfaat yang dapat dihasilkan dari internasionalisasi sebuah perusahaan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kepentingan negara *home* terhadap suatu perusahaan multinasional adalah untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dalam rangka mendapatkan manfaat yang umumnya berfokus pada pertumbuhan ekonomi negara *home*. Perusahaan multinasional dapat membantu mempercepat pertumbuhan perekonomian negara dan mengejar ketertinggalan dengan negara maju, khususnya bagi negara berkembang, melalui proses akumulasi teknologi (Ferdausy & Rahman, 2009: 111). Sehingga negara mendorong internasionalisasi perusahaan lokal untuk mendapatkan akses teknologi.

Lebih spesifik mengenai Tiongkok, pemerintah Tiongkok memiliki kebijakan yang mendukung perusahaan-perusahaan swasta lokal untuk berinvestasi

ke luar negeri, yang menciptakan kebijakan preferensial untuk investasi ke luar negeri bagi perusahaan swasta, termasuk insentif pajak, dukungan keuangan, dan reformasi bea cukai (Sauvant & Nolan, 2015: 896). Menurut Sauvant & Nolan (2015: 896), pemerintah Tiongkok memiliki dua kepentingan mengenai dukungannya terhadap perusahaan swasta lokal, yakni mendapatkan akses pasar melalui perusahaan Tiongkok yang memiliki daya saing global serta mempromosikan pembangunan Tiongkok dengan memperoleh sumber daya dan teknologi dari luar Tiongkok. Sehingga dalam penelitian ini, Huawei sebagai perusahaan swasta asal Tiongkok memiliki keterkaitan dengan negara *home*-nya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan negara *home*.

1.6.1.4. Intervensi terhadap Operasi Bisnis

Kim (1988: 16) mendefinisikan bahwa intervensi pemerintah terhadap operasi bisnis merupakan seluruh rangkaian kebijakan yang memberikan syarat atau pembatasan yang ditujukan kepada operasi bisnis perusahaan multinasional serta anak perusahaan multinasional yang dihasilkan dari keputusan politik dan/atau ekonomi negara *home*. Selaras dengan pernyataan tersebut, Wild & Wild (2015: 186) menjelaskan mengenai alasan politik dan ekonomi di balik intervensi pemerintah terhadap operasi bisnis, yang mana alasan politik berkaitan dengan keamanan nasional, praktik dagang yang tidak adil, serta melindungi ketenagakerjaan, sedangkan alasan ekonomi berkaitan dengan menjaga surplus perdagangan negara. Intervensi pemerintah akan memberikan hambatan bagi perusahaan multinasional yang terdampak dalam rangka mencapai efisiensi strategis dalam operasi bisnis mereka (Kim, 1988: 16-17). Merujuk pada serangkaian definisi tersebut, penelitian ini berfokus pada alasan pemerintah Amerika Serikat mengenai kebijakan intervensionisnya terhadap Huawei yang dinilai telah mengancam keamanan serta kepentingan nasional Amerika Serikat.

1.6.1.5. Rivalitas Teknologi

Wu (2011: 1) mendefinisikan bahwa rivalitas teknologi merupakan kompetisi yang umumnya dilakukan oleh aktor negara, yang mana merupakan inti dari persaingan ekonomi, militer, bahkan hingga kekuatan nasional, yang

membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kekuatan produktif utama. Rivalitas dalam sektor teknologi memiliki kecenderungan untuk meningkatkan tensi hubungan antarnegara, khususnya dalam sektor pengembangan teknologi. Teknologi merupakan salah satu tuas kekuasaan pada era modern, sehingga kemampuan untuk menciptakan teknologi baru, khususnya dalam ranah digital, menjadi faktor kunci dari adanya peningkatan tensi hubungan antara kedua negara yang bersaing (Lewis, 2018b:1). Inovasi memiliki peran sentral dalam setiap persaingan teknologi, seperti yang terjadi sejak era perang dingin ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berlomba untuk menciptakan teknologi baru. Sehingga sebuah kemampuan negara untuk berinovasi dan memproduksi teknologi mutakhir akan mendapatkan kekuatan ekonomi, militer, dan kekuatan lunak seperti kepemimpinan teknologi (Lewis, 2018b: 1). Lin (1992: 41-42) menyatakan bahwa kebijakan inovasi yang berupaya untuk mempercepat pengembangan serta produksi teknologi memiliki peran sentral dalam persaingan teknologi antar pemerintah negara. Sehingga tensi hubungan antar pemerintah negara akan naik seiring salah satu pihak dapat mewujudkan target pengembangan teknologinya terlebih dahulu melalui rangkaian kebijakan yang telah diformulasikan. Dalam kasus Huawei di Amerika Serikat, perusahaan Huawei merupakan perusahaan teknologi yang memiliki kapabilitas untuk mendominasi teknologi 5G secara global. Sebagai negara yang mengklaim kepemimpinan teknologi di dunia, pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk membendung dominasi yang dikejar oleh Huawei, karena terdapat keterkaitan antara Huawei dengan pemerintah Tiongkok yang kemudian dapat mengancam posisi Amerika Serikat dalam kepemimpinan teknologi dunia.

1.6.2. Tipe Penelitian Eksplanatif

Keseluruhan penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian Eksplanatif. Sesuai dengan pernyataan Prasetyo dan Miftahul (2011) yang menyatakan bahwa penelitian eksplanatif dilakukan untuk mengetahui atau menemukan penjelasan mengenai mengapa suatu fenomena terjadi. Penelitian eksplanatif dilakukan dengan membuktikan adanya hubungan sebab akibat yang memengaruhi suatu fenomena. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dengan memberikan gambaran detail mengenai hubungan sebab akibat.

1.6.3. Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang dimulai dari awal mula masuknya investasi Huawei di Amerika Serikat hingga pengesahan dokumen *entity list* dari BIS yang menyertakan Huawei di dalamnya. Merujuk pada pernyataan tersebut, penelitian ini memiliki jangkauan penelitian dari tahun 2001 hingga tahun 2019. Tahun 2001 dipilih karena pada tahun tersebut Huawei mulai meluncurkan operasi bisnisnya secara resmi di Plano, Texas. Tahun 2019 dipilih sebagai tahun batasan penelitian karena Amerika Serikat secara resmi memutus investasi Huawei melalui dokumen *entity list* dari BIS yang menyatakan bahwa Huawei telah mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya menjawab hipotesis dan menjawab rumusan masalah penelitian, Penulis akan mencari sumber data dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapat dari rilis resmi pemerintah Amerika Serikat, situs resmi pemerintah Amerika Serikat, serta rilis resmi pemerintah Tiongkok. Sumber sekunder berasal dari buku; jurnal; artikel-artikel dalam buku, majalah, atau surat kabar; dokumen pemerintah atau makalah yang dipublikasikan; internet; arsip dan laporan; hasil survei yang ada sebelumnya; serta referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi ke dalam empat bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metodologi penelitian. Bab kedua berisi mengenai ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh operasi bisnis Huawei terhadap Amerika Serikat. Bab ketiga berisi mengenai keterlibatan Tiongkok yang menyebabkan Huawei berhasil mendapatkan kesempatan untuk mendominasi pasar infrastruktur telekomunikasi global, serta terdapat rivalitas teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang menjadi faktor pendukung yang signifikan bagi diterapkannya kebijakan restriktif terhadap Huawei. Bab keempat berisi kesimpulan dari seluruh penelitian.